

**PERSYARATAN USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU
WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA
KARENA BERAKHIR MASA JABATAN**

Kabupaten/Kota (Provinsi) :
Nama :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA		
5.	SURAT USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA OLEH PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.